

Policy Brief

Razak H Umar



DESA Madani

Kabupaten Gorontalo
Konsep & Pengukurannya



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
KABUPATEN GORONTALO
@ 2022**

Ringkasan

Mewujudkan Tatanan kehidupan masyarakat Madani merupakan Visi Pembangunan Kabupaten Gorontalo saat ini dan masa depan, komitmen kuat pemerintah Daerah termuat dalam Dokumen Resmi Perencanaan Pembangunan Daerah dari waktu ke waktu (RPJMD). Pada tahap implementatif arah kebijakan pembangunan Masyarakat Madani di hadapkan pada sejumlah permasalahan diantaranya bagaimana menerjemahkan pencapaian Pembangunan Masyarakat Madani pada tingkat Desa?. Dalam kerangka ini pemerintah Daerah bermaksud mewujudkannya dalam Desa Desa Madani, lalu bagaimana konsep Desa Madani serta Parameter pengukurannya.?

Policy Brief ini berupaya Merumuskan konsep dan parameter Desa Madani kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah *Literatur Review dengan melakukan Analisis Content* dengan sumber Data Buku, Journal Laporan Resmi Pembangunan desa di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan kajian ini diperoleh konsepsi bahwa Desa Madani yakni **Kesatuan Masyarakat Madani** yang memiliki batas wilayah dan kewenangan secara otonom mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat yang didasarkan atas pandangan hidup *Ad Dienul Islam* (Ajaran Islam) yang kaaffah (menyeluruh). Terdapat 9 (Sembilan) Parameter **Desa Madani** di: (1) Tauhid – Sikap Religiusitas – IMTAQ, (2) Keadaban - Sikap Sosial, (3) Berkeadilan – Supremasi Hukum, (4) Ukhuwah – Persaudaraan – Gotong Royong-Demokratis, (5) Sikap Tasammuh & Tawasuth dalam pergaulan Sosial, (6) Amar Ma'arf Nahi Munkar, (7) Pemenuhan Kebutuhan Dasar & Pelayanan Dasar, (8) Aksesibilitas sumber-sumber ekenomi produktif dan (9) Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagai Rekomendasi Kebijakan ; Pertama, penentuan penilaian Desa Madani oleh pemerintah Daerah dapat mengelaborasi dan mengintegrasikannya dengan Parameter Pembangunan lainnya yang relevan dan saling menguatkan, Kedua, Pemilihan Desa Madani dapat dilakukan secara otonom oleh pemerintah daerah dengan kriteria khusus Desa Madani atau melanjutkan penilaian kinerja pembangunan desa oleh pemerintah misalnya syarat Desa Madani adalah Desa dengan status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Tertinggal dan Pembangunan Transmigrasi, Ketiga, pencapaian Status Desa Madani di cantumkan pada Revisi perodik Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana tahunan RKPd Kabupaten Gorontalo dengan maksud memastikan tahapan pencapaian Desa Madani yang terencana, terukur dan berkesinambungan. Selain itu, kebijakan ini menjadi penting dan strategis untuk implementasi teknis Desa mandiri oleh Pemerintah Desa dan Stakeholders terkait. Keempat, Pemerintah daerah memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk pemberdayaan, kolaborasi dan kemitraan dalam membangun Desa Madani yang Mandiri dan Sejahtera Dunia dan akhirat. Kelima, Pembangunan Kawasan *Madinatul Ilmu* perlu di operasionalisasikan secara nyata pada tingkat Desa. Masyarakat Beradab yang merupakan ciri Desa Madani dapat diwujudkan bila layanan pendidikan yang berkualitas menjamin masyarakat desa tanpa diskriminasi. Konsepsi Madinatul Ilmi dapat di jewantahkan melalui penyiapan kebijakan berbasis Pengetahuan dan fakta serta dukungan kepastian regulasi yang jelas dan di pertanggungjawabkan oleh seluruh pemerintah dan masyarakat. Semoga cita mulia ini senantiasa dalam tuntunan-Nya. Amien

Kata Kunci : Desa Madani, Masyarakat Madani



Daftar Isi

- A. Latar Belakang
 - B. Konsep Desa & Pembangunan Manusia
 - C. Desa Madani, Masyarakat Madani
 - D. Masyarakat Madani & Kesejarahan
 - E. Parameter Pengukuran Desa Madani
 - F. Status Capaian Desa Membangun Kabupaten
Gorontalo
 - G. Rekomendasi Kebijakan
- Daftar Bacaan



A. Latar Belakang

Mewujudkan Masyarakat Madani adalah Rumusan cita-cita pencapaian Pembangunan di Kabupaten Gorontalo yang terencana dan berkelanjutan. Visi Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju **Masyarakat Madani** ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, desain pencapaian visi pembangunan setidaknya di bagi pada tiga Tahapan yakni Tahap Pemantapan (2016-2021), Tahap Kemandirian (2021-2030) serta Tahap perwujudan masyarakat Madani (2030-2035). Masyarakat Madani pada aspek ini di devinisikan sebagai kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang berlaku, ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban. Sejumlah indicator kunci yang dijadikan parameter untuk mengenali pencapaian terwujudnya masyarakat Madani diantaranya : (1) Bernuansa kota; (2) Menjunjung tinggi hak-hak sipil; (3) Menjunjung tinggi nilai; (4) Menjunjung tinggi norma; (5) Menjunjung tinggi hukum; (6) Beriman; dan (7) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka Perwujudan masyarakat madani Pemerintah Daerah melakukannya melalui 3 (tiga) aspek pembangunan yakni ; (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan umum; dan (3) peningkatan daya saing daerah.

Hasil capaian ketiga aspek pembangunan daerah ini hingga tahun 2022 menunjukkan Performa yang belum menggembirakan. Sebagai Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo Daerah ini masih di hadapkan pada tantangan besar mengatasi kemiskinan ekstrem tahun 2020. Presentase kemiskinan ekstrem cukup tinggi yakni (17,56). Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,92 serta Rasio Kemandirian Daerah yang masih rendah yakni 11,31 persen.

Capaian pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo pada level Desa menunjukkan hasil capaian Indikator Pembangunan Desa yang belum optimal, setidaknya dapat di lihat pada (8) delapan indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Indeks Desa membangun (0,65) minimnya Keaktifan lembaga usaha ekonomi Desa, rendahnya kualitas Pengelolaan asset desa serta keterbatasan insiasi sinergitas kerjasama antar desa.



Memperhatikan Kondisi ini, maka patut kiranya pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap orientasi pembangunan desa sebagai tumpuan terbesar peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Tatanan masyarakat Madani yang di cita-citakan haruslah dirumuskan secara jelas pada setiap kebijakan pembangunan desa, dengan demikian konsepsi masyarakat madani benar-benar terwujud pada level pemerintahan desa. Persoalannya adalah Bagaimana menerjemahkan secara operasional konsep masyarakat madani dalam konteks Desa berikut parameter desa Madani ?

Policy Brief ini menyajikan konseptual Desa Madani dan parameter evaluasi pelaksanaannya.

B. Konsep Desa & Pembangunan Manusia

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Beberapa ciri-ciri desa yang cukup berbeda dengan perkotaan. Berikut di antaranya:

Pertama, Masyarakat di desa cenderung sangat dekat dengan alam. Jadi, semua pekerjaan yang dilakukan umumnya bersifat homogen dan bergantung pada iklim dan cuaca. Oleh karenanya, wajar bila mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, peternakan, atau perikanan. Kedua, Ikatan kekeluargaan masyarakat di desa lebih kuat daripada penduduk di wilayah lainnya. Maka tak heran, jika komunikasi yang dilakukan antar masyarakat pun lebih personal sehingga saling mengenal satu sama lain. Ketiga, selain itu, desa juga memiliki solidaritas masyarakat yang kuat. Hal ini terjadi karena rata-rata penduduk desa memiliki kesamaan ekonomi, budaya, dan tujuan hidup. Keempat, Kepadatan penduduk di desa tergolong rendah, sehingga rasio antara luas wilayah penduduknya pun kecil. Pns dapat melihat buktinya dengan mengamati jarak rumah satu dengan lainnya. Atau, bisa juga diketahui dari banyaknya rumah di pedesaan yang masih memiliki pekarangan luas. dan kelima Mobilitas di desa cenderung lebih rendah daripada wilayah lainnya.

Indeks Desa Membanguan (IDM)

Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa Pemerintah dalam hal ini kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah merumuskan Indeks Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks ini menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan,
2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan,
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan,
4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya, dan
5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki 12 Parameter kunci penjabaran dari 3 (tiga) Indeks Desa Membangun (IDM) yakni ; Indeks Ketahanan Sosial (4 parameter), Indeks Ketahanan Ekonomi (5 parameter) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (3 parameter). Selanjutnya masing-masing parameter tersebut di jabarkan menjadi 52 indikator.

Tabel 1.

Parameter Indeks Desa Membangun (IDM)

<i>Indeks Ketahanan Sosial (IKS)</i>	<i>Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)</i>	<i>Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)</i>
<i>Pendidikan</i>	Keragaman Produksi Masyarakat	Kualitas Lingkungan
<i>Kesehatan</i>	Akses Perdagangan & Pasar	Bencana Alam
<i>Modal Sosial</i>	Akses Listrik	Tanggap Bencana
<i>Permukiman</i>	Akses Perbankan & Kredit	
	Keterbukaan Wilayah	

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm>



Desa & Pembangunan Global

Dalam Konteks Pembangunan Global MDGS Desa memiliki posisi strategis. Kementerian Desa PDTT melalui Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 yang terfokus pada pemanfaatan dana desa untuk meraih *SDGs* Desa. Kemendesa PDTT menambahkan poin ke-18 dalam *SDGs* yang melahirkan *SDGs* Desa, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. *SDGs* Desa 18 menjadi upaya untuk mewadahi kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif (Kompas). Gus Menteri menyatakan *SDGs* Desa akan berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ada dua aspek *SDGs* Desa yang diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan, yakni aspek kewilayahan dan aspek kewargaan. Menilik fakta kewilayahan, 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah desa, sementara berdasar aspek kewargaan, 43% penduduk Indonesia berdomisili di desa dan 6 tujuan *SDGs* berkait kelindan dengan warga desa.

SDGs Desa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam Perpres tersebut disebutkan ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara *SDGs* Desa menambahkan satu tujuan lagi. Sehingga, *SDGs* Desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Pembangunan Desa harus berlandaskan pada kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang ada di Desa tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan 17 tujuan dan 169 target *SDGs* dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, yang meliputi Tujuan 1 sampai dengan 5. Pilar Pembangunan Ekonomi, yang meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17. Pilar Pembangunan Lingkungan, yang meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang meliputi Tujuan 16. Meskipun terbagi dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaan keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung

Dengan demikian, mendaratkan *SDGs* hingga tingkat tapak merupakan langkah strategis. Setidaknya untuk 2 hal, pertama, *SDGs* Desa menjadi kendaraan untuk memunculkan karakter budaya nusantara sebagai pijakan paradigma. *SDGs* Desa dapat menggalang kekuatan untuk mempertahankan identitas Indonesia di tengah deraan globalisasi yang membatasi dan merelatifkan kedaulatan negara serta hegemonik terhadap alam. Kedua, *SDGs* Desa menjadi tameng perlindungan sumberdaya alam desa dari privatisasi dan eksploitasi. Dua tujuan tersebut akan sulit terealisasi bila model pendekatan partisipatif tidak diinstitusionalisasi, bukan sekedar partisipasi yang artifisial dan temporer. Jika agenda ini berjalan, *SDGs* Desa menjadi peluang mengembalikan alam sebagai centrum yang berjalan di atas kearifan budaya nusantara. Perlu diingat, tanpa manusia, alam tetap dapat berkelanjutan, sementara manusia takkan dapat bertahan tanpa alam yang berkelanjutan.

C. Desa Madani, Masyarakat Madani

Desa yang di devinisikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam perumusan Desa Madani menitik beratkan pada konsepsi masyarakat Madani. Syed Muhammad Naquib Al-Attas mengatakan bahwa konsep masyarakat madani berasal dari kosa kata bahasa Arab yang berarti, *pertama*, “masyarakat kota” dan *kedua*, “masyarakat yang berperadaban”, sehingga masyarakat madani sama dengan *civil society*, yaitu



masyarakat yang menunjang tinggi nilai- nilai peradaban. (Asykuri, Ibn Chamim, dkk; 2003;48). Menurut pendapat Hall (1998) pengertian masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Hefner (1998:16-20) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi.

Berbeda dengan Al Attas dan Hall Furqon (2022 ; 1) dalam upaya antara konsep civil society dan “masyarakat madani” dari perspektif worldview-nya masing-masing menyimpulkan bahwa penyepadanan istilah civil society dengan masyarakat madani tidaklah tepat. Civil society lahir dan tumbuh berkembang dari tradisi masyarakat Barat yang erat kaitannya dengan nilai, konsep dan doktrin pandangan hidup Barat atau worldview Barat. Sedangkan, masyarakat madani lahir dan dibesarkan di dalam kultur masyarakat dan peradaban Islam yang memproyeksikan dan merepresentasikan din al Islam. Islam tidak hanya sebagai agama ritual, namun Islam menjadi sistem sosial-politik dalam seluruh dimensi-dimensinya yang diatur di dalam worldview Islam. Jadi, secara konseptual dan sistem antara civil society dan masyarakat Islam berbeda. Karena itu, civil society tidak dapat begitu saja diterapkan dalam masyarakat Islam atau pun sebaliknya.

Istilah “masyarakat madani” sendiri memiliki makna tersendiri dalam tradisi masyarakat Islam. Hamid Fahmi dalam Ahmad Furqon¹ menjelaskan bahwa Kata madani dalam bahasa Arab berasal dari kata madana yang artinya membangun, mendirikan kota, memajukan, memurnikan, dan memartabatkan. Dari kata ini lahir kata tamaddun yang berarti peradaban (civilization) atau yang juga berarti kota yang berlandaskan kebudayaan (city base cultur) atau kebudayaan kota (culture of the city) Sedangkan kata „Madinah“ sendiri sebagai nama baru dari Yathrib tidak diderivasi dari kata madana, melainkan sebaliknya. Kata madana terbentuk setelah lahir kata Madinah Artinya kata madana dan maknanya diderivasi dan dijiwai dari dan oleh kata dan makna Madinah yang akar katanya dari dana, yadinu, dinan atau daynan. Ibnu Mandzur, Al Attas² mencatat bahwa kata din itu sendiri telah membawa makna keberhutangan, susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecendrungan manusia untuk membentuk masyarakat yang menaati hukum dan mencari pemerintah yang adil Artinya dalam istilah din itu terkandung makna yang menunjuk kepada suatu sistem kehidupan. Oleh sebab itu tatkala din al Islam telah dan dapat disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat itu diberi nama Madinah. Maka, masyarakat madani adalah masyarakat yang merepresentasikan corak dan karakter din al Islam secara kaffah dalam seluruh struktur bangunannya meliputi struktur sosial, proses sosial, strata sosial, struktur politik, interaksi dan kontak sosial, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, pendidikan, tradisi, etika, sains, hukum, dan bahkan dalam konteks Negara.

Masyarakat Madani sebagai konsep dan sistem masyarakat lahir di dalam kultur masyarakat dan peradaban Islam yang mencakup berbagai aspek yakni ; konsep masyarakat erat kaitannya dengan konsep-konsep yang lain, seperti konsep Tauhid (Tuhan), konsep din al Islam (agama), konsep wahyu, konsep kenabian, konsep manusia, konsep moralitas. Dalam pandangan Al-Mawardi, misalnya, masyarakat Islam adalah masyarakat yang mencerminkan kesejahteraan secara utuh dengan tetap menegakkan

¹ Ahmad Furqon, **Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani, 2022**

² Syed Muhammad .Naquib Al Attas, *Dilema Kaum Muslimi*, (Surabaya: PT Binallmu,1986), 47-90.



prinsip-prinsip keseimbangan (mabadi³ al tawasuth) antara pencapaian kehidupan dunia dengan tujuan akhir kehidupan di akhirat (adab al dunya wa al din). Hal ini dapat terwujud apabila memenuhi dua kualifikasi; Pertama, tatanan masyarakat yang sistemik dan terintegrasi (muntadzamah wa multaimah). Kedua, moralitas manusia yang terwujud pada setiap individu. Penjelasan al-Mawardi ini lebih menekankan kepada prinsip dasar dari konstruk masyarakat Islam sebagai sebuah tatanan sosial yang dinamis. Sedangkan, menurut al-Attas masyarakat beradab sebagai makna dari “masyarakat madani”, adalah masyarakat yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang Haq, yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan. Intinya masyarakat beradab adalah masyarakat yang taat pada aturan Allah, bukan masyarakat sekuler dan demokratis sebagaimana dalam konsep civil society.

Dari sini dapat dikatakan bahwa “masyarakat madani” adalah masyarakat yang menjadikan din sebagai value system di dalam mengatur segala roda kehidupan, baik yang menyangkut hak-hak dan kewajiban individu atau pun berkaitan dengan kesamaan, kemanusiaan, keadilan, kemakmuran, kekuasaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Secara mikro, individu di dalam masyarakat madani ditempatkan sebagai „abdullah dan sekaligus khalifatullah. Secara makro, individu sebagai anggota masyarakat diletakkan ke dalam tatanan sosial yang disebut dengan ummah yang dilandasi dengan Tauhid dan diikat dengan ukhuwah. Artinya konsep din di sini melandasi seluruh dimensi dan sistem masyarakat madani dan sekaligus sebagai proses terbentuknya baladun thayibun wa rabbun ghafur. Dan konsep din dan dimensi-dimensinya tersebut secara keseluruhan diatur dan diproyeksikan di dalam worldview Islam. Sehingga, worldview Islam sebagai asas dan motor terwujudnya masyarakat Islam dalam kaitannya dengan aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, keadilan, kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya itu kemudian membentuk tatanan sosial atau ummah, secara kompleks juga disebut dengan al Tamaddun al Islami atau Islamic civilization (peradaban Islam). Di dalam peradaban Islam inilah struktur masyarakat madani lahir dan dibesarkan. Jika masyarakat Islam menunjuk kepada realitas masyarakat Islam secara umum, maka masyarakat madani secara spesifik menunjuk kepada masyarakat beradab (masyarakat kota) yang merupakan cikal bakal dan modal dasar terbentuknya peradaban Islam. Sebab, sebuah masyarakat dikatakan sebagai masyarakat madani apabila unsur pokoknya, yakni agama (din al Islam) telah dan dapat disempurnakan dan dilaksanakan secara komprehensif. Dalam lembaran sejarah tercatat seperti kota Madinah, kota Cordova, kota Baghdad, kota Samara, kota Cairo dan lain-lain adalah kota yang berasal dari suatu komunitas yang kemudian melahirkan negara dan bahkan „umran. Hasilnya masyarakat madani merupakan struktur sosial mikro berwujud „kota“ yang secara makro merupakan awal mula proses terbentuknya negara, „umran, dan peradaban Islam.

Dalam masyarakat madani aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya dibingkai ke dalam struktur worldview Islam yang secara konseptual mencerminkan tujuan dari syari³at Islam (maqashid al syari³ah). Dan tujuan dari syari³at Islam terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama (الدين حفظ), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga harta (حفظ المال).⁴⁹ Artinya bahwa segala dimensi kehidupan di dalam masyarakat madani baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya itu harus selaras dan seimbang (balancing) dengan syari³at Islam dan maqashid al syari³ah. Tidak bisa hal tersebut berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kebebasan, kehendak, keinginan dan

³ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam Dalam Pandangan Al Mawardi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 29



kemauan setiap individu atau kelompok tertentu. Singkatnya, syariat Islam dan maqashid al syariah (mashlahah) sebagai standar dan sekaligus sistem nilai dari seluruh proses dan prosedur kerja yang mengatur seluruh kehidupan, baik hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau pun antara sesama Artinya substansi dari peradaban Islam itu sendiri adalah pokok-pokok ajaran Islam yang tidak terbatas pada sistem kepercayaan, tata pikir, dan tata nilai, namun merupakan super-sistem yang meliputi keseluruhan pandangan tentang wujud, utamanya pandangan tentang Tuhan. Jadi, masyarakat madani merupakan model masyarakat Islam yang merepresentasikan struktur sosial dan spiritual dari peradaban Islam.

Oleh sebab itu, tradisi ilmu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat madani. Tradisi ilmu adalah syarat utama terbangunnya masyarakat madani. Karena masyarakat madani adalah kumpulan dari manusia-manusia beradab. Yaitu individu yang dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukan dan tempatnya; individu yang dapat menempatkan kedudukan dirinya dihadapan Penciptanya dan dikalangan masyarakatnya. Individu- individu ini dilahirkan melalui proses penanaman dan pemahaman akan ilmu dan ilmu pengetahuan secara berkesinambungan melalui proses pendidikan. Dalam worldview Islam, ilmu di sini tidak lain adalah wahyu itu sendiri (alquran dan al Sunnah) dan berbagai cabang atau disiplin ilmu yang diderivasi dari padanya. Jadi, masyarakat madani dibentuk melalui tradisi ilmu yang kuat guna melahirkan manusia-manusia beradab atau manusia yang ber-madani (tunduk dan patuh) kepada din al Islam melalui proses pendidikan (*ta'dib, tarbiyah dan ta'lim*).

Dengan demikian masyarakat madani yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi dan kultur masyarakat dan peradaban Islam sejatinya adalah masyarakat yang dalam segala dimensi-dimensinya telah dan dapat mengejawantahkan *din al Islam* serta mendorong seluruh anggota-anggotanya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Suatu struktur masyarakat yang dihuni oleh manusia-manusia beradab, yakni manusia yang dapat menempatkan dirinya dihadapan Penciptanya dengan baik dan dapat memposisikan dirinya di masyarakatnya secara tepat. Sehingga, tercipta interaksi masyarakat yang dihiasi oleh etika dan moralitas. Karena, telah terbangun suatu visi dan misi bersama (*common or public. interest*), yaitu mengabdikan kepada Tuhan dengan melaksanakan *Din al Islam* secara sempurna dan konsekuen. Interaksi dan relasi masyarakat tersebut diikat dengan suatu ikatan yang kokoh berlandaskan Tauhid, yang disebut dengan ukhuwah dan dipersatukan dalam satu wadah kesatuan lintas suku, etnis, ras, geografis, dan bahkan negara yang disebut dengan ummah. Dan masyarakat madani merupakan bagian dari struktur sosial atau tata sosial „ummah“ yang merepresentasikan worldview Islam yang lahir dari tradisi memahami wahyu, yaitu alquran dan al-Sunnah.

Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. (Srijanti, dkk; 2009; 198). Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor :

Pertama, Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi(menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. karena adanya monopoli.

Kedua Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warga negara tidak memiliki



kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan ketiga Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, karena pada ruang publik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara dan akan mampu melakukan transaksi-transaksi politiktanpa ada kekhawatiran. (Srijanti, dkk;2009:199).

Tatanan masyarakat Madani memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu : Pertama, Diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralitas bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Kedua Tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain dan ketiga, Tegaknya prinsip demorasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama- sama membangun dan memperjuangkan perikehidupanwarga dan masyarakat yang semakin sejahtera. (Srijanti, dkk; 2009:202). Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkannilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik dan lembaga masyarakat. (Srijanti, dkk; 2009:203).

Mengingat struktur sosial ekonomi yang semakin beragam, karakteristik masyarakat madani Indonesia adalah perpaduan yang serasi diantaranya kedua konsep yaitu konsep *al madinah al fadhilah* (Al Farabi) dan konsep *civil society* yang berkembang dalam negara-negara industri. Namun sekali lagi, konsep *civil society* diterapkan pada masyarakat Indonesia modern harus diadaptasikan dengan karakteristik masyarakatnya yang bersifat sosialis- religius. Masyarakat Indonesia modern itu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. ***Iman dan takwa***, artinya masyarakat sipil yang diinginkan masyarakat yang etis religius, yang lebih mengetengahkan akhlak dankebijakan manusia sebagai makhluk Tuhan.
- b. ***Demokratis***, adalah masyarakat yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ke arah terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan.
- c. ***Kemandirian***, ialah kesiapan masyarakat menghadapi tantangan masa depan, persaingan global, peningkatan nilai tambah dan transformasi menuju masyarakat modern.
- d. ***Keunggulan***, nilai ini berwujud mentalitas manusia dalam masyarakat yang menilai tinggi terhadap hasil karyanya dan dorongan untuk menghasilkan suatu karya adalah kepuasan untuk mencapai karya itu sendiri.
- e. ***Profesional***, adalah masyarakat yang memiliki hasrat utnuk melakukan eksplorasi lingkungan dan sumber- sumber kekuatan alam, yang akan menjadikan manusia mampu malukan inovasi, perubahan dan penyempurnaan.
- f. ***Supremasi hukum (rule of law)***, yaitu seluruh kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang tidak dikendalikan oleh suatu sistem kekuatan tetapi berlandaskan



pada hukum dan aturan yang disepakati bersama. (Furqon dan Dasin Budimansyah ; 2009).

Di dalam masyarakat madani relasi-relasi individu dalam kelompok sosialnya diikat dengan suatu konsesus moral yang diwujudkan dalam tata aturan hukum. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai alat kontrol pengendalian diri dan sebagai rambu-rambu aktivitas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kesadaran masyarakat mentaati konsesus moral dalam segala bidang kehidupan, dimulai dengan perilaku individu di dalamnya apakah sudah mencerminkan kaidah-kaidah etika, sehingga akan menjadi cermin dalam menata kehidupan sosial, sehingga tidak mudah terbawa pengaruh negatif yang menjurus kepada tindakan-tindakan amoral. Baik-buruknya perilaku individu-individu dalam masyarakat mencerminkan peradaban masyarakat itu sendiri.

Relasi-relasi individu dan kelompok sosial di dalam masyarakat madani berupa kesadaran untuk bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, baik dibidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya disertai dengan keikhlasan yang tulus dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, saling menghormati hak asasi manusia, saling toleransi, dan saling tolong-menolong sebagai perwujudan visi masyarakat madani. Visi yang dikembangkan harus mencerminkan moral etika masyarakat. Moral- etika inilah sebagai landasan menata sistem masyarakat madani. Namun, tanpa ada kemauan yang keras dari individu-individu di dalamnya masyarakat madani hanyalah *utopia*, karena sistem yang di bangun pada dasarnya adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang beretika.

Pemberdayaan itu sendiri merupakan usaha menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, seperti melepaskan dari kungkungan tradisi yang kaku dan berfikir *progress* dalam mengantisipasi lajunya perkembangan zaman. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah karena adanya daya kekritisan dan seluk beluk tindakannya dan atau dalam melihat kondisi realitas disekitarnya. Dengan daya inilah masyarakat madani menjadi alat kontrol sosial dan penjaga keseimbangan antara pemerintah negara dan warganegaranya. Oleh karena itu, diperlukan suatu visi untuk memperjelas langkah strategis pengembangan masyarakat madani. Visi ini dimaksudkan sebagai wawasan ke masa depan, tidak saja sebagai wacana semata tetapi juga untuk "*the human progress*". Dengan demikian, visi masyarakat madani menjadi paradigma ideal yang telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya terutama sumber daya manusianya.

Visi masyarakat madani berusaha mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat yaitu: (1) Menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia (Q.S Al Isra':70); (2) Memupuk rasa persatuan dan kekeluargaan manusia (Q.S Al Hujarat:13); (3) Mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan batin (Q.S Al Maidah:2); (4) Memupuk jiwa toleransi (Q.S Fuslihat:34); (5) Menghormati kebebasan orang lain; (6) Menegakkan budi baik; (7) Menegakkan keadilan (Q.S An Nahl:126); (8) Perlakuan sama (Q.S Al Baqorah:194 dan An Nahl:126); (9) Memenuhi janji (Q.S Al Isra':34); (10) Menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan (Q.S Al Hasyr:9).



Penerapan visi masyarakat madani dilakukan secara menyeluruh artinya dilakukan bagi semua komponen yang ada dalam masyarakat, tidak hanya diperuntukkan bagi sebagian komponen saja. Dalam khasanah intelektual muslim, Masyarakat madani—bila dikategorikan dengan ummah—menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mempunyai makna universal, tidak hanya dipahami secara eksklusif sebagai entitas seagama, tapi juga dipahami secara inklusif dimana penekanannya didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Hal ini berbeda dengan Ali Syariati dan al Qurthubi yang hanya memaknai secara eksklusif yakni sebatas kalangan seagama (Shihab, 1997:395). Dalam pemahaman inklusif inilah masyarakat madani lebih difungsikan untuk (1) Menciptakan kohesi sosial; (2) Memperkuat titik-titik temu kultural, social, politik dan ekonomi diantara berbagai kelompok sosial yang beragam. Bangunan masyarakat madani—sebagaimana diungkapkan Asrori S. Karni (1999)— dilakukan dengan mengembangkan dan menekankan penerapan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam konfigurasi pluralistik, misalnya prinsip toleransi, keadilan, dialog (*syura*), perdamaian, supremasi hukum, persamaan, partisipasi politik, kebebasan beragama, kontrol sosial dan sejenisnya.

Selain berorientasi pada perwujudan tatanan peradaban dalam dimensi social-horisontal, masyarakat madani juga memperhatikan dimensi vertical-transendental, mengingat problema dalam masyarakat bukan hanya problema sosial-politik semata, tetapi juga *problema social-spiritual* (Asrori S. Karni, 93-95). Maka, landasan moral spiritual merupakan syarat yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses pengembangan masyarakat madani. Hal ini dikarenakan keselarasan kehidupan manusia (masyarakat), perwujudannya apabila mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai moral-spiritual sebagai kekuatan pengontrol tatanan berkehidupan bersama. Jadi, tatanan berkehidupan bersama dengan nilai-nilai sosial dan moral-spiritual haruslah mampu menumbuhkembangkan sikap manusia yang memungkinkan terciptanya masyarakat dengan visi yang jelas. Untuk itulah mengembangkan sikap demokratis tidak bisa ditawar lagi. Dan ini merupakan suatu keharusan bukan hanya mengenal pembentukan yang mempunyai harga diri, yang berbudaya, yang memiliki identitas kebangsaan, tetapi juga menumbuhkan sikap demokratis yang didukung oleh sistem yang juga mengembangkan sifat demokratis.

Di samping sikap demokratis, karena pluralitas masyarakat memerlukan kesadaran saling memahami, menghormati hak-hak masyarakat dan tidak mengganggu antara sesama, maka sikap toleransi merupakan visi tersendiri dalam menumbuhkan saling pengertian, saling mengayomi dan menghargai. Untuk itulah kesadaran bertoleransi yang tinggi, akan menguatkan ikatan kesatuan masyarakat, sehingga tidak mudah digoyangkan oleh provokasi-provokasi isu-isu sara.

Dengan demikian, visi terbentuknya masyarakat madani pada dasarnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka dalam menyusun konsep masyarakat madani perlu dikembangkan *common dominator* dari setiap unsur perekat masyarakat, sehingga cita-cita untuk mewujudkannya mendapat dukungan dengan pemahaman visi yang sama (M. dawam Rahardja, 1999:32). Akhirnya sebuah masyarakat yang demokratis, konstruktif, inovatif dan egaliter menjadi implikasi etis dari cita-cita masyarakat madani. Dari visi yang dikemukakan di atas perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan- pembinaan yang berkelanjutan bagi warga masyarakat, demikian juga pemenuhan- pemenuhan sarana



pendukungnya baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini sebagai upaya transformasi pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai etika sosial masyarakat madani.

D. Masyarakat Madani & Kesejarahan

Dalam sejarah Panjang Islam terdapat dua masyarakat madani yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu:

1) Masyarakat Saba’.

Masyarakat Saba adalah masyarakat di masa Nabi Sulaiman sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 SM, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Saba’ benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahuinya.

Awalnya kerajaan Saba’ dikenal dengan Dinasti Mu’iinah sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba’. Ibu kotanya Sharwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma’rib. Pada periode inilah bendungan Ma’rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 SM hingga 620 SM. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 SM – 115 SM, barulah mereka dikenal dengan nama Saba’. Mereka menjadikan Ma’rib sebagai ibu kotanya.

Kerajaan Saba’ terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba’

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri.” (QS. Saba’: 15)

Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Saba’ menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman *‘alaihissalam*.

Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba’ tetap mentauhidkan Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah mengutus tiga belas orang rasul kepada mereka (*Tafsir Ibnu Katsir*, 6: 507), akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monotheisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka,

“Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir al-‘arim.” (QS. Saba’: 16)

Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” (QS. Saba’: 16-17)

Dalam firman-Nya yang lain



“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim.” (QS. An-Nahl: 112 – 113).

Kalau kita renungkan kisah kaum Saba’ dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian, bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur, lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Saba’ ini di dalam Alquran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Saba’. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kaum ini

2). Masyarakat Madinah

Masyarakat Madinah dalam setelah sejarah terjadi kesepatan, perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur’an sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Pulungan dalam penelitiannya tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur’an menemukan adanya keterkaitan erat antara keduanya meskipun pada saat penyusunan piagam Madinah belum keseluruhan ayat-ayat Al-Qur’an di wahyukan kepada nabi Muhammad SAW.⁴ Prinsip-prinsip tersebut disajikan dalam rangkuman berikut ini :

⁴ Dalam desertasinya tentang Prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur’an. Yang termasuk dalam kajian bidang politik (Fiqh Siyasah) Pulungan mengemukakan permasalahan mendasar apakah prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Sebab, kenyataan historis dalam desertasinya bidang politik (*Fiqh Siyasah*) yang sudah dibukukan ini Pulungan mengemukakan permasalahan mendasar apakah prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Sebab, kenyataan historis bahwa ketika Piagam Madinah dibuat ketika wahyu belum turun seluruhnya dan dengan demikian muatannya merupakan ketetapan-ketetapan Nabi (*ahkam nabawiyat*). Teks piagam Madinah yang dianalisis tersebut diambil dari tiga sumber yaitu Kitab *Sirat Rasulullah* oleh Ibnu Ishaq, kitab *Al-Shirat An-Nabawiyah* oleh Ibnu Hasyim, kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid al Qasim bin salam dan kitab *Majmuat al-watsaiq Al Siyasiay lil al ahdi al nabawi wa al khilafat al-rasyidat* oleh Muhammad Hamidullah. Sumber-sumber ini dipilih karena sumber pertama (Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam) berbeda dari sumber kedua (Ibn Sallam) dalam hal susunan redaksi dan kata-kata yang digunakan serta muatannya, meskipun tidak membawa pada perbedaan makna bahkan saling melengkapi. Perbedaan lainnya adalah bahwa kedua sumber itu tidak memakai nomor pasal, sedangkan sumber ketiga (Muhammad Hamidullah) memakai nomor pasal. Meskipun terdapat keterkaitan prinsip –prinsip dalam piagam dengan ayat-ayat Al-Qur’an namun terdapat masalah dalam menentukan kronologis antara perumusan teks Piagam dan waktu turunnya ayat –ayat Madaniyah-Makiyah. Karena informasi tentang hari, tanggal, bulan dan tahun turunnya setiap ayat Al-Qur’an tidak ditemukan dalam catatan sejarah.



Tabel. 1.1
Prinsip-prinsip Pemerintahan Amanah dalam Piagam Madinah
dan Alqur'an

No	Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah	Dalil-Dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadis)	Contoh Praktis
1	Prinsip Umat	Al-Hujurat ; 13, An –Nisai : 28, Al-Maidah : 2, An-Nisai :1, Ali Imran : 112, Al-An Am : 165 An-Nisa : 36	Penyatuan penduduk madinah dalam satu umat. (Arab-Yahudi, Kaum Paganis)
2	Prinsip Persatuan dan persaudaraan	Al-Baqarah : 143, Al-Maidah : 48, Al-Araf : 181, AL-Anfal : 72	Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar- juga non-muslim
3	PrinsipPersamaan	Al-Hujurat : 9-13, An-Nisai : 1, Al-Araf :189, Az- Zumar : 6,	Perlakuan yang sama bagi masyarakat Madinah
4	Prinsip kebebasan	Al-Baqorah : 178, Al-Anfal : 72, At-Taubah :71, Al-Araf :33, Al-Maidah : 32, Al-Kafirun : 6, Al-Baqorah :256, Yunus : 99, Al-Kahfi : 29, Yusuf : 103.	Adanya kebebasan politik, sosial dan beragama
5	Prinsip Hubungan antar pemeluk Agama	Al-Mumthanah : 8-9, Al-Maidah : 5, Al-Ankabut : 46.	Jalinan antar umat beragama secara harmoni.
6	Prinsip Pertahanan	Al-Maidah : 5, Al-Ankabut : 46, At-Taubah 38-41	Rasa aman dan penegakan hukum bagi siapa pun.
7	Prinsip bertetangga	AL-Baqorah : 120, Al-Imaran :69,	Nabi suka bersahabat dengan tetangganya pada semua level dan kelompok

No	Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah	Dalil-Dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadis)	Contoh Praktis
8	Prinsip Tolong menolong dalam membela yang lemah dan teraniaya	Al-Mumthanah : 8, Al-Imran : 140, Al-Baqorah : 258, Al-mIadah : 2	Tolong menolong dalam persaudaraan kaum Anshar - Muhajirin
9	Prinsip Perdamaian	Al-Hujurat : 9-10, Al-Anfal :61, An-Nisai :91,	Perdamaian dengan kaum Musyrik dan Yahudi dalam <i>Shulh l-Hudaibiyah</i> (Perjanjian)



			Hudaibiyah) pada tahun 6 H.
10	Prinsip Musyawarah	Al-Syuara : 38, Al-Imran : 159.	Bermusyawarah dalam strategi perang dan tawanan. (Perang Ahzab
11	Prinsip Keadilan	A-Nisa: 3,58, 129,135. Al-Maidah : 8,42. Al-An'am :125. Al-Baqorah :282-283, Al-Hujurat 9-10, Al-araf :29, Ar-rahman :9.	
12	Prinsip pelaksanaan Hukum	Al-Baqorah :178, Fathir :18, Al-an'am :164, An-najm : 38, Al-Araf :73.	Penegakan hukum meskipun dilingk keluarga Rasul
13	Prinsip Kepemimpinan	An-Nisai :59, 105. An-Nahl :44	Praktek-praktek kepemimpinan yang diteladani
14	Prinsip Amar Makruf Munkar	Al- Baqorah : 2, Al-Imran :138, Al-Maidah : 2, An-Nisai : 9, Al-Maidah : 35, Al-Imran : 135, Al-Hujurat : 13.	Menyerukan kebaikan bagi semua orang

Konsep tata pemerintahan yang baik telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad S.A.W ketika hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 622 M, beliau membangun suatu masyarakat yang ideal di Madinah. Konsep-konsep seperti partisipasi, konsensus, keadilan, supremasi hukum telah diperkenalkan Nabi Muhammad S.A.W ketika beliau membangun *Madinah* sewaktu hijrah dari Makkah tahun 622 M. Kata Madinah bermakna sebuah tempat yang didiami orang-orang yang taat peraturan dan saling memenuhi perjanjian yang diciptakan (al-uqud). Dalam hal ini *tata pemerintahan yang baik akan tercapai jika masing-masing pelaku menaati kesepakatan yang telah disetujui bersama*. Selain itu tata pemerintahan yang baik hanya akan tercapai bila ada pemimpin bervisi strategis, pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan. Pemimpin tersebut harus mampu mengembangkan potensi anggota masyarakatnya dan menciptakan konsensus diantara semua pihak yang berkepentingan, seperti teladan Nabi Muhammad S.A.W.⁵

E. Parameter Pengukuran Desa Madani

Masyarakat madani lahir dan tumbuh dari dan di dalam tradisi serta kultur peradaban Islam, maka worldview Islam merupakan dasar utama dari keseluruhan elemen-elemen yang mendasari struktur bangunannya. Worldview Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Syed Naquib Al Attas mempunyai elemen penting yang menjadi karakter utamanya. Elemen penting dari worldview Islam itu antara lain; Pertama, realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak (visible world) dan yang tidak nampak (invisible world). Kedua, metode berfikirnya tauhidi (integral). Ketiga, bersumber kepada wahyu. Keempat, struktur bangunannya terdiri utamanya dari konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep penciptaan, konsep psikologi manusia, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan 6 Jadi, masyarakat madani

⁵ Nurcholish Madjid, Tata pemerintahan yang baik dari kita untuk kita. Partnership for Governance Reform. Tahun 2002. hal 3

⁶ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi...*, 10-12



sebagai konsep dan sistem masyarakat Islam struktur atau tata sosialnya mencerminkan struktur worldview Islam.

Oleh karena struktur sosial masyarakat madani sebagai representasi dari keseluruhan elemen-elemen worldview Islam, maka worldview Islam merupakan elemen utama dan pertama dari masyarakat madani. Sehingga, elemen-elemen pembentuk dan penyusun struktur masyarakat madani juga merupakan elemen yang diderivasi dari worldview Islam. Di antara elemen-elemen masyarakat madani antara lain; Pertama, berlandaskan kepada wahyu (Alquran dan al Sunnah). Artinya masyarakat yang bersumber dan berpegang teguh kepada wahyu. Kedua, struktur sosialnya merepresentasikan struktur worldview Islam yang tauhidi (integral). Ketiga, din al Islam („aqidah, syari‘ah dan akhlaq/adab) sebagai sistem atau value system. Keempat, framework dan pola relasi dan interaksi sosialnya berupa relasi antara „Abdullah dan Khalifatullah yang dikuatkan dan disokong dengan sistem ukhuwah, ummah, da‘wah, syura, keadilan (supremasi hukum), persamaan (egalitarian), tasamuh (toleran), dan sebagainya. Jadi, masyarakat madani merupakan pengejawantahan dari konsep-konsep yang diproyeksikan dari dan di dalam worldview Islam ke dalam ruang kehidupan sosial-politik umat. Dengan demikian, secara konseptual masyarakat madani sebagai konsep dan sistem masyarakat merupakan bagian dari produk worldview Islam yang membentuk struktur kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultur/tradisi, moral/etika, hukum, yang dikuatkan melalui jalinan ukhuwah, ikatan ummah, pola interaksi yang moralis dan aktivitas dakwah yang berkesinambungan yang tercermin dari keseluruhan elemen-elemen yang membentuknya. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai din al Islam dalam seluruh lini dan segi kehidupan, baik dalam skala mikro, makro dan bahkan dunia. Masyarakat terdidik yang menjadikan ilmu sebagai basis dari keseluruhan amal dan aktivitasnya. Masyarakat yang melestarikan manusia dari kerusakan, kehancuran, kebinasaan dan kezaliman antar sesama. Jadi, keseluruhan dari pada elemen-elemen masyarakat madani pada dasarnya bersifat rabbani.

Parameter terhadap status Desa Madani dilakukan dengan mengaju pada karakteristik khas yang di miliki oleh masyarakat Madani sebagai satu kesatuan Hukum, wilayah dan kewenangan yang dimiliki. Bila merujuk pada konsep Pengembangan masyarakat, setidaknya ada beberapa syarat terbentuknya masyarakat madani diantaranya sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.



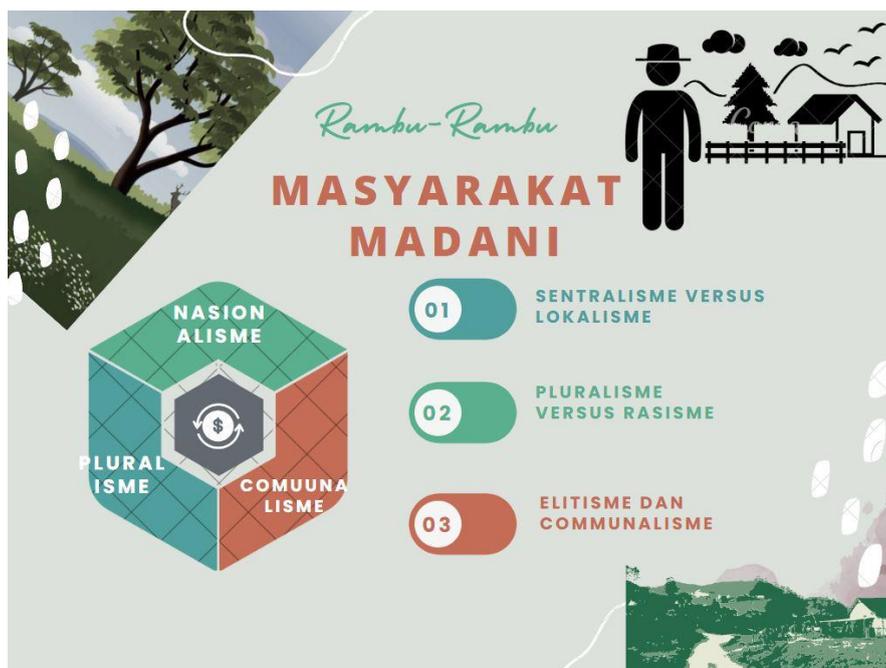
Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “*sipilisme*” yang sempit yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Terdapat rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa. Jebakan formalisme praktek masyarakat Madani tersebut meliputi :

Pertama, Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam paham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.

Kedua, Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “...penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia. Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.

Ketiga, Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat





Karakteristik Masyarakat Madani lainnya yang dapat di gunakan sebagai parameter Desa Madani, yakni :

- 1) Tauhidi, yaitu masyarakat yang menjadikan Tauhid sebagai asas dan cara pandang terhadap totalitas kehidupannya. Menurut, Isma'il Raji Al Faruqi bahwa Tauhid adalah
- 2) Religious (din al Islam), yaitu masyarakat yang menjadikan dan mendasarkan Islam sebagai sistem di dalam seluruh segi-seginya. Menurut Al Mawardi, unsur utama dari masyarakat madani, yaitu agama yang diikuti dan dita'ati (din muttaba"). Jadi, seluruh aktivitas masyarakat tersebut selalu senantiasa berdasarkan dan berkaitan dengan din, baik berupa „aqidah (keyakinan), „ibadah (ritual), dan bahkan mu'amalah (interaksi dan transaksi) di antara para anggotanya.
- 3) Beradab, yaitu masyarakat yang terdidik, yang mana setiap anggotanya melakukan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan hukum (syari'ah). Artinya masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dihadapan Allah Swt. dan dapat pula memainkan perannya di dalam masyarakatnya sesuai dengan kedudukannya.
- 4) Berkeadilan, yaitu masyarakat yang selalu berpihak kepada kebenaran. Artinya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan berdasarkan tuntunan syari'ah.
- 5) Ukhuwah, yaitu masyarakat yang dibangun melalui sistem muakhah (persaudaraan) dengan iman sebagai ikatan. Iman sebagai dasar hubungan manusia yang melahirkan persaan kasih sayang atau cinta di antara mereka.
- 6) Toleran, yaitu masyarakat yang didasarkan kepada toleransi. Yaitu suatu sikap menghargai perbedaan dan keragaman (pluralitas) dengan tetap menjaga perbedaan tersebut. Secara sosial, lebih mengedepankan sikap- sikap yang lebih humanis dan natural tanpa menghapus perbedaan itu sesuai dengan ketentuan syara".
- 7) Tawassuth, yaitu masyarakat yang dalam sikap dan tindakan selalu mengambil jalan tengah. Artinya bersikap proporsional dan profesional yang disertai dengan sikap komitmen dan amanah yang tinggi atau disebut juga dengan masyarakat yang moderat.



- 8) Amar Ma'ruf Nahy Munkar, yaitu masyarakat yang senantiasa aktivitasnya berorientasi kepada kebaikan dan kemaslahatan manusia dengan tidak membiarkan kemungkaran, kemaksiatan dan kedzaliman merajalela di tengah-tengah kehidupan mereka



Berdasarkan sejumlah karakteristik dan parameter Masyarakat Madani dalam ulasan ini, maka dalam konteks Implementasi pengukuran / evaluasi Parameter Desa Madani di kabuapetn dapat dilakukan secara terintegrasi dengan Target capaian indicator Pembangunan Daerah serta Indikator Pembangunan Global (SDGs- Desa). Status Keterkaitan antara Parameter Desa Madani dengan Indikator Capaian Pembangunan berbasis desa sebagaimana di tunjukan oleh Grafik berikut

No	Parameter Desa Madani	IKPD (Bid. Pemb. Masy Desa)	IDM	SDGs Desa
1	Tauhid – Sikap Religiusitas - IMTAQ	***	**	*
2	Keadaban - Sikap Sosial	***	**	**
3	Berkeadilan – Supremasi Hukum	***	**	*
4	Ukhuwah – Persaudaraan – Gotong Royong-Demokratis	***	**	**
5	Sikap Tasammuh & Tawasuth dalam pergaulan Sosial	***	**	*
6	Amar Ma'arf Nahi Munkar	***	**	**
7	Pemenuhan Kebutuhan Dasar & Pelayanan Dasar	***	**	*
8	Aksesibilitas sumber-sumber ekenomi produktif	***	**	**
9	Pemberdayaan Masyarakat	***	***	***



Keterangan :

*** = sangat kuat ** = Kuat * = Cukup

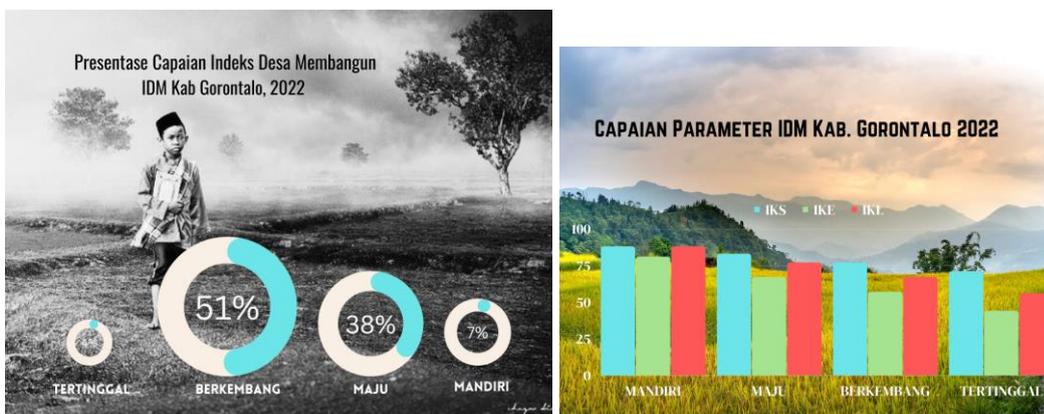
IKPD = Indikator Kinerja Pembangunan Daerah- Target RPJMD Kab Gorontalo 2021 – 2026

IDM = Indeks Desa Membangun

SDGs Desa = *Sustainable development Goals (SDGs)*

F. Status Capaian Desa Membangun Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo adalah satu dari 6 (enam) kabupaten /Kota di Profinsi Gorontalo, memiliki luas wilayah 2.143,48 km² atau 17,24% dari luas Provinsi Gorontalo.⁷ Memiliki 19 kecamatan, 191 desa dan 14 kelurahan. Status pencapaian Indeks Desa membangun Kabupaten Gorontalo tahun 2022 menunjukkan lebih dari separuh Desa berada dalam status berkembang (51 persen) atau 98 Desa, 38 persen (72 Desa) Maju dan hanya 4 persen (8 Desa) Status Desa tertinggal. Adapun dalam kategori Mandiri sebesar 7 persen (13 Desa) yang meliputi desa Ambara, Ayuhulalo, Botubolu'o, Momala, Olimeyala, Tulemelito, Tonalala serta Desa Ulapato B. (Sumber ; <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>, diolah)

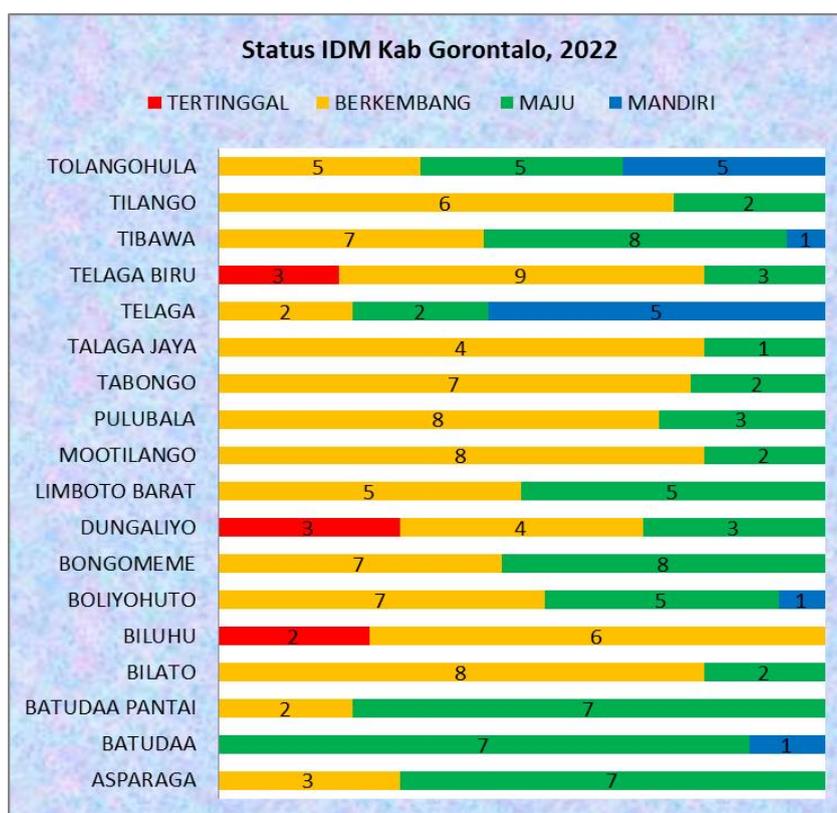


Capaian secara rinci berdasarkan masing-masing Indeks yakni : Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) , Indeks Kemampuan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing Indeks dalam pembentukan skor Indeks Desa Membangun (IDM) cukup merata baik pada kategori Desa Mandiri, Maju, berkembang dan Desa Tertinggal. (Lihat Tabel Capaian Parameter IPM Kabupaten Gorontalo tahun 2022)

⁷ RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021 – 2026



Status Pencapaian Indeks Desa Membangun tahun 2022 berdasarkan Wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Status Desa tertinggal berada di kecamatan Dunggaliyo 3 Desa (Desa Ambara, Desa Ayhula dan Desa Momala), kecamatan Telaga Biru 3 Desa (Desa Talumelito, Tonala dan Desa Ulapato B), dan kecamatan Biluhu 2 Desa (Desa Botuboluo dan Desa Olimeyala) . Sedangkan desa dengan status Desa Mandiri terbanyak di kecamatan Telaga yakni 5 Desa (Desa Bulila, Hulawa, Luhu, Mongolato dan Desa Pilohayanga) dan kecamatan Tolangohula 5 Desa (Desa Gandaria, Gandasari, Lakeya, Makmur Abadi dan Desa Suka Makmur), lainnya berada di kecamatan Batudaa 1 Desa (Desa Payunga), kecamatan Boliyohuto 1 Desa (Desa Sidomulyo) serta kecamatan Tibawa 1 Desa (Desa Isimu Selatan)



G. Rekomendasi Kebijakan

Sebagai Rekomendasi Kebijakan ; Pertama, penentuan penilaian Desa Madani oleh pemerintah Daerah dapat mengelaborasi dan mengintegrasikannya dengan Parameter Pembangunan lainnya yang relevan dan saling menguatkan, Kedua, Pemilihan Desa Madani dapat dilakukan secara otonom oleh pemerintah daerah dengan kriteria khusus Desa Madani atau melanjutkan penilaian kinerja pembangunan desa oleh pemerintah misalnya syarat Desa Madani adalah Desa dengan status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Tertinggal dan Pembangunan Transmigrasi, Ketiga, pencapaian Status Desa Madani di cantumkan pada Revisi perodik Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangan



Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana tahunan RKPD Kabupaten Gorontalo dengan maksud memastikan tahapan pencapaian Desa Madani yang terencana, terukur dan berkesinambungan. Selain itu, kebijakan ini menjadi penting dan strategis untuk implementasi teknis Desa mandiri oleh Pemerintah Desa dan Stakeholders terkait. Keempat, Pemerintah daerah memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk pemberdayaan, kolaborasi dan kemitraan dalam membangun Desa Madani yang Mandiri dan Sejahtera Dunia dan akhirat. Kelima, Pembangunan Kawasan *Madinatul Ilmu* perlu di operasionalisasikan secara nyata pada tingkat Desa. Masyarakat Beradab yang merupakan ciri Desa Madani dapat diwujudkan bila layanan pendidikan yang berkualitas menjamin masyarakat desa tanpa diskriminasi. Konsepsi Madinatul Ilmi dapat di jewantahkan melalui penyiapan kebijakan berbasis Pengetahuan dan fakta serta dukungan kepastian regulasi yang jelas dan di pertanggungjawabkan oleh seluruh pemerintah dan masyarakat.

Mewujudkan ciri-ciri masyarakat madani dalam kehidupan berbangsa, tentu saja dibutuhkan sebuah proses yang panjang yang melibatkan berbagai unsur. Proses inilah yang layak dinamakan dengan proses penemuan kembali dan pemberdayaan masyarakat madani (*the recovery and empowerment of civil socceity*). Pemberdayaan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *empowerment*, adalah suatu optimalisasi dari fungsi-fungsi komponen yang ada di dalam diri individu dan kelompok. Sistem pemberdayaan masyarakat madani itu dapat ditilik dari segi individunya sendiri, kelompok maupun masyarakat. Pemberdayaan yang akan dibahas dalam tulisan ini dipilahkan dari segi strategi pemberdayaan itu sendiri, pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan tersebut juga dari segi potensi yang diberdayakan. Ditinjau dari segi strateginya, maka pemberdayaan masyarakat madani berdasarkan pengalaman sejarah dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain :

Pertama, Revitalisasi peran kaum cendikiawan. Pengalaman di berbagai belahan dunia(seperti Havel di Ceko dan Adam Michnik di Polandia) membuktikan bahwa revitalisasi peran kaum cendikiawan sering melahirkan sebuah kebangkitan baru pada masyarakat untuk lebih mengaktualisasikan eksistensinya. Suara, tulisan, pamflet bahkan karya seni kaum cendikiawan mampu menjadi sebuah energi baru pada masyarakat “akar rumput” sekalipun ⁸. Di Indonesia, berdirinya ICMI dan organisasi cendikiawan sejenis dapat menghadirkan sebuah kesadaran dan keberanian baru. Demikian pula mahasiswa sebagai bagian cendikiawan juga memiliki andil yang besar bagi proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat madani. Revitalisasi peran mahasiswa yang pasang surut sesuai dengan proses perjalanan sejarah nampaknya perlu dicermati, sehingga mahasiswa tetap tegak sebagai kelompok yang memiliki posisi tawar yang baik sehingga negara tidak terlalu dominan.

Kedua, Strategi politik sejajar. Strategi ini sebenarnya merupakan strategi kompensasi saja bagi sebuah masyarakat yang frustrasi akibat rezim totaliter yang terlalu lama berkuasa. Strategi politik sejajar (*parallel politics*) digunakan oleh kaum pro demokrasi yang perwujudannya dalam bentuk kegiatan politik bebas seolah-olah mereka berada dalam kondisi politik yang demokratis. Strategi ini hanyalah *defense mechanism* sementara namun jika dilakukan secara intensif dapat menjadi

⁸ M Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung:Penerbit Mizan, 1999, hal. 43-71



“tandingan” sistem politik totaliter.⁹

Ketiga, Strategi menciptakan wilayah publik yang bebas. *The Free Public Sphere* diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta menyiarkan penerbitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang termasuk wilayah ini, antara lain media massa, kampus dan sekolah, gedung-gedung pertemuan umum, parlemen dan sebagainya. Salah satu bentuk konkritnya adalah adanya kebebasan pers yang sesungguhnya, sehingga mampu menjadi alat dan mekanisme kontrol sosial politik yang ampuh dalam menegakkan demokrasi.¹²

Keempat, Strategi aktualisasi *life world*. *Life world* menurut Habermas secara singkat dapat diartikan sebagai kesepakatan sosial yang telah terbentuk dalam tradisi, kebudayaan, bahasa yang dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada suatu masyarakat. *Life world* ini mencakup masalah khazanah pengetahuan (*stock of knowledge*), sumber keyakinan-keyakinan (*reservoir of convictions*), solidaritas dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan digunakan secara otomatis oleh para anggota komunitas. Dalam totalitarisme sebuah negara, maka *life world* ini terbonsai dan tidak mendapat kesempatan untuk teraktualisasikan. Akibatnya akan terjadi sebuah krisis *life world* baik secara individual maupun kelompok. Krisis ini dapat berbentuk munculnya kecenderungan eskapisme, apatisisme maupun fundamentalisme. Selanjutnya aktualisasi *life world* ini juga akan menguatnya partisipasi aktif masyarakat lewat pranata-pranata politik yang dibuat.

Kelima, Strategi memperkuat supremasi hukum. Salah satu ciri masyarakat madani adalah keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum. Hal itu akan terwujud jika hukum cukup memiliki wibawa (*law inforcement*) dapat terwujud dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum hendaklah menjadi panglima dan negara tunduk pada kekuasaan hukum serta tidak ikut campur dalam menentukan proses jalannya peradilan. Tegaknya *rule of law* (negara yang menghormati dan mempraktekkan hukum) akan membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu sistem pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi negara juga perlu ditegakkan.

Keenam, Strategi melalui *civic culture* dan *civic education*: *Civic culture* yang diartikan sebagai sebuah budaya yang mendukung setiap warga masyarakat, seperangkat gagasan yang menjelma secara efektif dalam penampilan budaya yang bertujuan menanamkan identitas masyarakat. *Civic culture* inilah yang menyediakan sarana bagi terselenggaranya *civic education*, dan *civic education* yang menghasilkan dan memperkuat *civic culture*. Jadi keduanya saling berkaitan satu sama lain dan ketika keduanya berfungsi secara efektif maka sebagian besar masyarakat akan berkesempatan untuk mengembangkan sikapnya, dan nilai-nilai yang sebenarnya serta memiliki posisi tawar yang baik. Baik *civic education* maupun *civic culture* merupakan sebuah jembatan bagi terciptanya masyarakat yang mandiri dan terdidik sehingga mampu melakukan proses pengambilan keputusan bagi kemaslahatan dirinya, keluarga maupun masyarakat tanpa tekanan baik dari dalam diri maupun dari luar (tekanan dari dalam diri dapat tercipta karena keraguan akan identitas dan kemampuan maupun pengalaman traumatik masa lalu).

Ketujuh, Strategi sosialisasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cita-cita masyarakat madani yang menempatkan manusia dalam posisi sentral sulit tercapai apabila individu-individu dalam masyarakat dan negara tidak memahami konon pula

⁹ Goldfarb, J. Beyond Glasnost, *The Post Totalitarian Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1989, hal 34.



tidak menghormati hak asasi manusia. Untuk itu mensosialisasikan dan melakukan pendidikan HAM merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat madani.¹⁰

Demikianlah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat madani, tentu saja masih banyak strategi lain yang dapat dilakukan guna meraih cita-cita ideal terbentuknya masyarakat yang saling menghargai sesama.

Selanjutnya Jika ditilik dari segi pendekatannya maka pemberdayaan masyarakat madani dapat ditempuh melalui tiga model pendekatan yaitu:

Pertama, Pendekatan melalui keterlibatan aktif dalam birokrasi atau berkiprah dalam kerangka jaringan korporasi negara. Pendekatan ini dikarenakan jalan reformasi masyarakat yang ideal adalah dari atas (*top down*) dan mereka masuk ke dalam birokrasi sehingga dapat melakukan perbaikan dari dalam serta dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini seringkali hanya indah ketika belum dimulai, namun seringkali individu yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ini akan terbentur manakala sistem yang berlaku dalam sebuah negara tidak mendukungnya. Akhirnya individu-individu itu tentu akan lebih berat mempertimbangkan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini juga kurang efektif karena sebuah sistem yang kurang baik biasanya juga akan mengimbas pada pribadi-pribadi yang ada dalam sistem tersebut. Ketegaran sebuah pribadi dalam lautan kebobrokan akan tenggelam juga meskipun membutuhkan proses dan waktu untuk itu.

Kedua, Pendekatan pemberdayaan masyarakat dari luar wilayah negara tersebut namun tetap mengupayakan hubungan dengan negara. Pendekatan kedua ini sekaligus memadukan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan ini melakukan pemberdayaan masyarakat di luar wilayah negara namun tetap mengupayakan hubungan yang harmonis dengan negara atau setidaknya elite negara. Pendekatan ini biasanya terbentur dengan terjadinya sebuah konflik di mana kebijakan negara amat berbeda dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh individu yang akan memberdayakan masyarakat melalui model ini. Biasanya konflik ini kemudian diselesaikan dengan pencarian titik temu yang seringkali justru lebih banyak memuaskan kepentingan negara.

Ketiga, Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui model transformatif. Pemberdayaan pada masyarakat di luar wilayah negara dengan prioritas pada lapisan bawah. Pendekatan ini berupaya mengambil jarak dari negara meskipun bukan berarti menolak keberadaan negara. Cita-cita pendekatan ini adalah bagaimana agar kekuatan negara yang sangat besar itu dapat diimbangi oleh kekuatan masyarakat yang semakin mandiri. Secara jangka panjang pendekatan ini amat ideal, apalagi jika pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara holistik. Adapun jika ditilik dari potensi yang akan diberdayakan, maka pemberdayaan masyarakat madani dapat dilakukan melalui pemberdayaan tiga potensi yang ada pada individu-individu dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri yaitu :

Keempat, Pemberdayaan intelektual. Melalui pemberdayaan *intellectual content* sejak dini baik pada individu dalam wilayah negara, masyarakat atau justru negara itu sendiri. *Intellectual content* di sini tidak hanya kecerdasan logika saja melainkan juga kecerdasan kreatif yang secara gradual akan terbonsai jika tidak ada kemauan baik dari negara. Oleh itu salah satu contoh konkrit terbonsainya kecerdasan kreatif pada fenomena penggunaan pakaian seragam sekolah secara massal, hal ini merupakan

¹⁰ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maafke Panik Aceh*, ttp: Cordova, 2000, hal.18



suatu pelecehan nyata sebuah eksistensi kreatifitas. individual. Jika digunakan alasan disiplin, namun sebenarnya sekolah sebagai sebuah *the free public sphere* dapat mendisainnya sesuai dengan kreativitas lokal. Hingga hari pendidikan masih merupakan sebuah jalan bagi mobilitas vertikal yang adil pada masyarakat, untuk itu kesempatan mengenyam pendidikan dapat dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat¹¹

Kelima, Pemberdayaan kepribadian. Kepribadian individu dan kepribadian masyarakat dalam tatanan masyarakat madani perlu dilakukan hingga pemberdayaan segi kepribadian ini akan lebih terfokus. Salah satunya kita dapat menggunakan sandaran kepribadian sehat model Maslow (tokoh psikologi humanistik) yang memberikan simbol *the self actualizing*

Keenam, Pemberdayaan perilaku. Perilaku merupakan aktivitas, gerak, respon yang dilakukan organisme yang pada dasarnya merupakan aktualisasi aspek intelektual dan kepribadian seseorang. Jika pemberdayaan segi intelektual dan kepribadian telah dilakukan maka konsekuensinya perilaku seseorang yang tercermin tidak akan lari jauh dari kondisi tersebut. Perilaku yang cerdas disertai dengan perencanaan dan perhitungan yang cermat, mandiri, demokratis dan berbagai ciri intelektual dan kepribadian lainnya tidak akan bertengger pada kawasan ide saja, melainkan akan terimplementasi dalam dunia nyata menjadi bentuk perilaku aktual apabila kondisi dan situasi mendorong untuk itu.

¹¹ ¹⁵Bumi Aksara, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PeraturanPelaksanaannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 4



Daftar Bacaan

Ahmad Furqon, *Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani*. Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol.1 No.1 Januari 2022, hal. 1-20

Abdillah, Masykuri, "Islam dan Masyarakat madani". *KOMPAS* (Jakarta), 27 Februari 1999

Ibrahim, Anwar. 1999. "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani", dalam M. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia" dalam Jurnal *Paramadina*, vol.1, no.2.

Madjid, Nurcholis. 1999. "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", Pengantar untuk Ahmad Baso dalam *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Arifin, Syamsul. "Etika Pluralisme dan Konstruksi Masyarakat madani". *REPUBLIKA* (Jakarta), 14 Mei 1999.

Machasin. "*Islam dalam Budaya Majemuk*" makalah Studium General PPs. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 September 1998.

Muhammad Soim, *Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam)*. Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32

Madjid, Nurcholis. "Azas-Azas Pluralisme dan Toleransi dalam masyarakat madani ". *Makalah seminar nasional*, "Masyarakat Madani dalam Prespektif Agama dan Politik". Oleh IAIN Jakarta, 22 februari 1999.

Pulungan, J. Suyuthi. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2.

Rahardja, M. Dawam. "Agama dan Masyarakat Madani". *Makalah seri dialog kebudayaan I: "Agama dan Masyarakat Madani"*. Oleh LSAF dan KOMPAS bekerjasama dengan Paramadina. Jakarta, 13 Desember 1996

